

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta.
- A.R., Putri, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta.
- Chaniago, Arifinal, 1982, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Gunawan, K. Adi, 2002, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Inggris*, Kartika, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja RosdaKarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notaril di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pachta, W Andjar, dkk., 2005, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Sudarsono, dan Edilius, 1993, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti, R, dan R. Tjiro Sudibyo, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Untung, Budi, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.

Widiyanti, Ninik, dan Y.W. Sunindhia, 1998, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 3502.

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

C. Internet

Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, https://sisminbhkop.id/downloads/Panduan_untuk_Notaris_dan_Dinas.pdf, diakses pada tanggal 5 November 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus versi online / dalam jaringan), <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 5 November 2018.